

BAB I

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum tahun 2021, Myanmar (sebelumnya Burma) pernah berada di bawah kekuasaan militer selama dua kali, yaitu di bawah Partai Program Sosialis Burma (*Burma Socialist Programme Party/BSPP*) yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win (1962-1988) dan di bawah Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara (*State Peace and Development Council/SPDC*, 1988-2011). Pada tanggal 1 Februari 2021, Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang merupakan Panglima Tertinggi Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar) melancarkan kudeta militer terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih demokratis dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

Motivasi Min Aung Hlaing dalam melancarkan kudeta adalah dugaan kecurangan yang dilakukan oleh partai politik Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dalam pemilu yang diadakan pada November 2020, dimana NLD memenangkan 920 (82 persen) dari total 1.117 kursi terpilih yang diperebutkan secara nasional, sementara partai proksi Tatmadaw, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), hanya memperoleh 71 kursi (6,4 persen) dari kursi terpilih.

Kudeta ini memulihkan kekuasaan militer penuh di Myanmar setelah periode demokratisasi dan liberalisasi yang dimulai pada tahun 2011, ketika seorang mantan jenderal Angkatan Darat Myanmar, Thein Sein untuk pertama kalinya terpilih secara demokratis sebagai presiden Myanmar, melaksanakan reformasi parlementer, dan membuka Myanmar kepada investasi asing dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Aung San Suu Kyi, Penasihat Negara Myanmar yang digulingkan, ditahan dan menghadapi berbagai tuduhan bermotif politik, seperti melanggar

aturan Covid-19, korupsi, dan mengimpor *walkie-talkie* secara ilegal (Goldman, 2022).

Sebelum kudeta 2021, Myanmar diperintah berdasarkan pengaturan pembagian kekuasaan antara pemerintah sipil dan militer, di bawah Konstitusi 2008, yang memastikan bahwa militer tidak pernah berada di bawah wewenang sipil dan mencadangkan 25 persen kursi parlemen, tiga portofolio menteri utama (pertahanan, dalam negeri, dan perbatasan), dan salah satu jabatan wakil presiden. Militer berharap pengaturan ini mampu mempertahankan pengaruhnya dalam politik domestik Myanmar, tetapi pemilu November 2020 membuktikan bahwa keseimbangan telah bergeser. Dalam beberapa minggu menjelang kudeta, Min Aung Hlaing menyatakan dukungannya untuk klaim kecurangan pemilu oleh USDP, namun Komisi Pemilu Myanmar (*Union Election Commission/UEC*) tidak menemukan bukti kuat untuk mendukung klaim ini.

Tatmadaw memproklamirkan dirinya sebagai penjaga solidaritas, persatuan, dan kedaulatan nasional dengan ‘kewajiban dan hak’ untuk memerintah Myanmar. Kemenangan NLD dalam pemilu November 2020 berpotensi membahayakan kepentingan bisnis Tatmadaw yang cukup besar serta pengaruh politiknya. Min Aung Hlaing seharusnya pensiun pada Juli 2021 dan kudeta militer 1 Februari 2021 mampu memperpanjang kekuasaan politik dan jaringan patronasinya, yang meliputi bisnis keluarga yang menguntungkan dan luas. Pemilu baru juga dianggap memudahkan Hlaing dalam meraih kepresidenan (ambisinya yang sudah lama terpendam) jika USDP berhasil memenangkan sepertiga kursi dan menghindari penuntutan di mahkamah internasional atas perannya dalam kekejaman militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine, Kachin, dan Shan (BBC, 2021).

Jutaan orang di seluruh negeri Myanmar turun ke jalan untuk menentang kekuasaan junta militer yang baru, Dewan Administrasi

Negara (*State Administration Council/SAC*), yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Ketika demonstrasi damai pro-demokrasi berjalan (metode yang paling terkemuka adalah memukul panci (*pot-banging*) dan salam tiga jari (*three-finger salute*)), aparat junta membalasnya dengan cara kekerasan, seperti menembakkan peluru tajam pada para pengunjuk rasa yang tidak bersenjata. Pada Juni 2021, setidaknya 887 orang diperkirakan telah tewas dan lebih dari 6.000 ditangkap oleh junta militer sejak kudeta.

Pada April 2021, para anggota parlemen Myanmar yang digulingkan dan perwakilan beberapa partai politik etnis membentuk pemerintahan paralel, Pemerintah Persatuan Nasional (*National Unity Government/NUG*) untuk menyinkronkan perlawanan terhadap kudeta militer Tatmadaw dan menciptakan titik temu untuk memperoleh dukungan dan pengakuan masyarakat internasional sebagai pemerintahan sah Myanmar. Pada bulan yang sama, pemerintahan SAC menetapkan NUG sebagai organisasi teroris dan mengumumkan bahwa 24 menteri kabinet dan wakil menteri NUG telah didakwa dengan tuduhan makar dan perkumpulan ilegal (*The Straits Times*, 2021).

Kudeta militer 2021 membawa gejolak ekonomi dan menghapuskan pencapaian sederhana dalam pengurangan kemiskinan yang dicapai selama satu dekade terakhir di Myanmar. Perekonomian nasional menyusut hampir 20 persen pada tahun 2021. Selain itu, sistem perawatan kesehatan runtuh di tengah pandemi Covid-19. Jutaan orang menghadapi kelaparan dan puluhan ribu telah melarikan diri ke daerah lain di Myanmar atau melintasi perbatasan ke India dan Thailand. Bahkan (Kurlantzick, 2021) mengatakan bahwa Myanmar telah menjadi negara gagal (*failed state*) akibat kudeta.

Salah satu masalah utama yang dihadapi perekonomian Myanmar adalah devaluasi mata uang nasionalnya, kyat. Kyat telah kehilangan sekitar setengah nilainya. Devaluasi ini meningkatkan

inflasi hingga 16% pada tahun 2022, menurunkan kemampuan warga untuk membeli barang dan jasa. Akibatnya, daya beli sangat berkurang dan banyak warga berjuang bahkan untuk membeli kebutuhan pokok. Program Pangan Dunia (WFP) memperkirakan bahwa 14,4 juta orang, lebih dari 25% populasi, menghadapi kerawanan pangan. Devaluasi juga merugikan bisnis, membuat barang impor dan bahan baku lebih mahal, serta menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi. Selain itu, depresiasi telah mempersulit Myanmar untuk menarik investasi asing, karena ketidakstabilan mata uang menghalangi rasa percaya investor. Situasi ekonomi Myanmar secara keseluruhan menjadi semakin mengerikan karena devaluasi kyat dan kemungkinan akan membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan untuk memulihkan stabilitas ekonomi.

Masalah besar lainnya adalah *brain drain* penduduk usia kerja, dengan ribuan orang diperkirakan meninggalkan negara itu setiap bulan. Sejak kudeta, banyak profesional muda dan pekerja terampil yang tersisa telah dipenjara dan dibunuh. Hal ini mengakibatkan kekurangan tenaga kerja terampil di Myanmar, yang semakin menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kerusuhan sipil yang sedang berlangsung telah mempersulit bisnis untuk beroperasi, sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan dan menurunnya aktivitas ekonomi.

Karena sifat perekonomian Myanmar yang didominasi oleh militer dan kroni-kroninya, sanksi internasional telah mempersulitnya untuk berdagang dengan negara lain dan semakin melemahkan ekonominya. Sanksi internasional telah ditargetkan pada junta militer dan bisnisnya serta individu dan perusahaan yang mendukung rezim tersebut. Selain sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh AS dan UE, krisis politik dan hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Myanmar juga menyebabkan banyak bisnis internasional hengkang. Banyak perusahaan multinasional

terkemuka telah meninggalkan negara tersebut, termasuk *Telenor*, *Kirin*, *Woodside Petroleum*, *Chevron*, *TotalEnergies*, *Voltalia*, dan *British American Tobacco*, karena kekhawatiran atas peran militer dalam pemerintahan, pelanggaran hak asasi manusia, dan situasi politik yang tidak stabil.

Kepergian bisnis internasional ini telah menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan yang signifikan bagi masyarakat Myanmar dan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ini juga semakin membatasi akses negara ke investasi dan teknologi asing, menghambat kemampuannya untuk mengembangkan dan memodernisasi ekonominya. Degradasi infrastruktur yang kritis, seperti energi dan komunikasi, telah membuat bisnis tidak dapat beroperasi dengan andal. Selain itu, sanksi dan penghentian bisnis juga telah menurunkan cadangan devisa negara dan meningkatkan inflasi, sehingga semakin mempersulit negara untuk mengimpor barang dan jasa serta melunasi utangnya.

Perekonomian Myanmar terpuruk sejak kudeta militer yang gagal pada Februari 2021. Ketidakmampuan dan salah urus junta menyebabkan devaluasi mata uang, *brain drain* penduduk usia kerja, dan sanksi ekonomi. Selama junta mengelola ekonomi, kecil kemungkinannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional Myanmar. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat internasional untuk terus menekan junta untuk memulihkan demokrasi dan mengizinkan pemerintahan sipil yang memenuhi syarat untuk mengatasi masalah ekonomi negara (Byrd, 2023).¹

Myanmar menyetujui \$1,45 miliar dalam investasi asing langsung selama tujuh bulan pertama tahun fiskal 2022-2023,

¹ Byrd, M. (2023, 1 Februari). Myanmar Economy in Tailspin, 2 Years after the Military Coup. Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies. <https://dkiapcss.edu/myanmar-economy-in-tailspin-2-years-after-the-military-coup/>

sebagian besar dari Singapura, saluran untuk uang asing ke Myanmar dan Tiongkok, menurut data resmi. Pemerintahan SAC telah berhenti mengungkapkan proyek yang telah disetujui sejak kudeta, serta menghapus atau membatasi akses ke sejumlah daftar perusahaan. Perusahaan energi Tiongkok termasuk di antara sedikit perusahaan asing yang tampaknya bersedia melakukan investasi baru di negara itu, berpartisipasi dalam rencana pemerintah SAC untuk memperluas tenaga surya.

Namun, mengingat skala masalah yang menimpa industri tersebut, para ahli mengatakan proyek tersebut tidak mungkin mengatasi akar penyebab pemadaman listrik kronis di negara itu, yang meliputi runtuhnya tata kelola yang stabil, konflik, dan volatilitas mata uang. “Sistem energi Myanmar berantakan dan tidak ada rencana untuk memperbaikinya. Tidak hari ini, tidak dalam lima tahun,” kata Guillaume de Langre, seorang ahli energi yang pernah menjadi penasihat pemerintah Myanmar, kepada Al Jazeera. “Junta berbohong kepada para investor, sementara kekuatan perlawanan lokal meningkatkan serangan canggih mereka pada titik-titik kritis jaringan listrik.”

Bahkan jika jajak pendapat tetap berjalan, mereka tidak mungkin berbuat banyak untuk meyakinkan investor. “Pemilu’ tidak siap untuk menginspirasi kepercayaan investor yang nyata di Myanmar, setidaknya untuk jangka pendek,” kata seorang sumber di Yangon yang memiliki akses ke militer dan menolak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan. Dia berharap waktu pemrosesan bisnis akan tetap lebih lambat sekarang karena keadaan darurat telah diperpanjang. “Tindakan keras pada periode pasca-pemilu akan meningkat dalam upaya untuk menggambarkan perlawanan sebagai hambatan untuk kembali ke ‘bisnis seperti

biasa'." Tapi tidak seperti perusahaan multinasional, pebisnis, pemilik toko, dan petani Myanmar tidak punya tempat tujuan.²

1.2 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu yang telah membahas dan mengupas tentang krisis politik dan kemanusiaan pasca-kudeta Myanmar 2021 dan upaya ASEAN dalam menyelesaikannya. Beberapa penelitian terdahulu dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni kelompok pertama yang membahas krisis politik pasca-kudeta Myanmar 2021 dan kelompok kedua yang membahas upaya ASEAN dalam penyelesaiannya.

Pada kelompok pertama yang membahas tentang krisis politik pasca-kudeta Myanmar 2021, Hendra Manurung dalam tulisannya yang berjudul *Myanmar Political Instability: A Threat to Southeast Asia Stability* yang dipublikasikan pada tahun 2021 di Jurnal Asia Pacific Studies membahas bahwa 11 hari setelah kudeta terjadi, ketua junta militer Myanmar yang baru (*State Administration Council* (SAC)), Min Aung Hlaing menyerukan agar publik Myanmar bermitra dengan SAC dan Tatmadaw demi memenuhi tuntutan mereka untuk demokrasi yang lebih besar (Manurung, 2021).

Osbin Samosir dalam tulisannya berjudul *Why Indonesia's Political Attitude not Strong in Myanmar's Military Coup? Regional Political Studies for Elections and Democracy* yang dipublikasikan pada tahun 2022 di jurnal *Canadian Social Science* membahas bahwa para tokoh militer Myanmar ingin terlibat dalam politik karena mereka akan pensiun, termasuk Komandan Angkatan Darat yang seharusnya pensiun pada Mei 2021. Akan tetapi, karena kalah

² Chau, T. & Oo, D. (2023, 2 Februari). 'Riding a rollercoaster' in Myanmar's post-coup economy. Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/2/2/riding-a-rollercoaster-in-myanmars-post-coup-economy>

dalam pemilu, tidak ada cara lain yang bisa mereka lakukan selain menggulingkan pemerintahan yang sah (Samosir, 2022).

Yongwook Ryu, Bernard Minn, dan Myat Myat Mon dalam tulisan mereka yang berjudul *The Military Coup in Myanmar: Time to Prioritise ASEAN Centrality and Communal Values* yang dipublikasikan pada tahun 2021 di laman *ISEAS-Yusof Ishak Institute* membahas bahwa kudeta militer Myanmar 2021 menimbulkan kesan dejavu yang mengingatkan pada kudeta tahun 1988 karena berkonsep serupa, yakni kemenangan telak NLD dalam pemilu, penolakan militer untuk menerima hasil pemilu, demonstrasi pro-demokrasi yang meluas, dan respons brutal Tatmadaw (Ryu et al, 2021).

Ye Myo Hein dalam tulisannya berjudul *The Root Causes of Myanmar's Coup Go Deeper* yang dipublikasikan pada tahun 2022 di laman *Wilson Center* membahas bahwa terdapat lima penyebab struktural kudeta, yaitu (1) reformasi politik yang sebenarnya dimaksudkan untuk menciptakan rezim hibrida yang meleburkan unsur-unsur otoritarianisme dan demokrasi; (2) Konstitusi 2008 memuat beberapa ketentuan yang memastikan “*domain* kekuasaan yang dilindungi” untuk Tatmadaw karena wewenangnya atas tiga kementerian, yaitu pertahanan, dalam negeri, dan urusan perbatasan; (3) tanpa berfungsinya negara dan adanya konsensus tentang identitas nasional, konsolidasi demokrasi yang berhasil pasti tidak mungkin; (4) arus liberalisasi politik membuka ruang yang aman bagi bangkitnya gerakan nasionalis Buddha agresif yang dipimpin oleh para biksu garis keras; dan (5) kegagalan pemerintahan NLD dalam memajukan demokrasi dan kebebasan mendasar yang menyebabkan Myanmar mengalami kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) (Hein, 2022).

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam *policy paper*-nya yang berjudul *Seeking Strategic Options for Myanmar: Reviewing Five-Point Consensus and Anticipating the*

Future of Democracy in Myanmar yang dipublikasikan pada tahun 2022 membahas bahwa peluang pertumbuhan ekonomi Myanmar sirna karena gejolak politik pasca-kudeta militer 2021. Selain itu, Myanmar terus terjerumus ke dalam krisis kemanusiaan yang lebih luas dengan penindasan politik junta militer yang semakin parah dan mengerikan (CSIS, 2022).

Anna S. King dalam tulisannya berjudul *Myanmar's Coup d'état and the Struggle for Federal Democracy and Inclusive Government* yang dipublikasikan pada tahun 2022 di jurnal *Religions* membahas bahwa kudeta militer Myanmar 2021 memulihkan status istimewa Tatmadaw dalam kehidupan publik dan sosial Myanmar, karena Tatmadaw menganggap diri mereka sebagai penjamin tiga 'tujuan nasional' bangsa Myanmar; persatuan, stabilitas, dan kedaulatan (King, 2022).

Siti Ghina Fauziah dan Made Fitri Maya Padmi dalam tulisannya berjudul *The Myanmar Military Coup in 2021 and the Future of Democracy* yang dipublikasikan pada tahun 2022 di jurnal *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* membahas bahwa setelah satu tahun berlalu, kudeta militer Myanmar 1 Februari 2021 tetap berjalan. Pernyataan pemerintahan SAC bahwa pihaknya akan mengadakan pemilu ulang dan mengembalikan kekuasaan ke tangan sipil tidak direalisasikan. Hal ini menggambarkan bahwa masa depan demokrasi Myanmar masih sangat jauh, bahkan tidak lagi stagnan tetapi bergerak mundur karena kudeta militer dan penahanan para aktivis masyarakat sipil. Masa depan demokrasi Myanmar pun suram dan kemungkinan besar sistem politik otoriter negara Asia Tenggara tersebut akan terus berlanjut dan bertahan (Fauziah et al, 2022).

Ye Myo Hein dalam tulisannya yang berjudul *One Year On: The Momentum of Myanmar's Armed Rebellion* yang dipublikasikan pada tahun 2022 di laman *Wilson Center* membahas bahwa selama berlangsungnya gejolak politik Myanmar pasca-kudeta 2021,

berbagai aktor keamanan baru muncul dan beberapa di antaranya dengan cepat dilembagakan, sehingga menimbulkan tantangan krusial bagi pemerintah SAC yang perlahan-lahan terbebani. Aktor keamanan non-negara yang sudah ada sejak lama, seperti organisasi bersenjata etnis (EAO), juga telah menyesuaikan diri dengan situasi yang berkembang, dengan beberapa menggunakan pertempuran, yang lain berjuang untuk memosisikan diri, dan beberapa memanfaatkan kekacauan untuk memajukan kepentingan dan tujuan masing-masing (Hein, 2022).

Hnin Mya Thida dalam tulisannya yang berjudul *People's Perception of the Role of Foreign Power in Myanmar: A Case Study of the 2021 Military Coup* yang dipublikasikan pada tahun 2021 di jurnal *Foreign Policy Review* membahas bahwa demi membuktikan kesediaan mereka untuk menolak kekuasaan junta militer Myanmar yang baru, SAC, gerakan pembangkangan sipil (CDM) dimulai sebagai kampanye daring oleh para profesional Myanmar, misalnya pekerja medis dan perawatan kesehatan. Selain pegawai pemerintah dan perusahaan, rakyat jelata juga ikut bekerja sama dengan CDM dalam hal memboikot produk dan jasa dari bisnis-bisnis milik militer, berhenti memasang iklan di surat kabar milik negara, dan tidak membeli surat kabar negara di mana militer mengiklankan kebijakan mereka dan mencetak berita palsu untuk dikonsumsi publik Myanmar dan masyarakat internasional (Thida, 2021).

K. M. Seethi dalam tulisannya berjudul *Military coup in Myanmar: 'Garrison State' back to dismantle democracy* yang dipublikasikan pada tahun 2021 di jurnal *Global South Colloquy* membahas bahwa kudeta militer 2021 dipercaya secara luas sebagai akibat dari keserakahan politik pribadi Min Aung Hlaing, yang disoroti karena pembersihan etnis terhadap minoritas Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Ada kecaman internasional yang luas atas kekejaman militer terhadap Rohingya dan bahkan pembatasan perjalanan yang dikenakan pada Min Aung Hlaing oleh Pemerintah

Amerika Serikat karena keterlibatan langsungnya dalam pembersihan etnis (Seethi, 2021).

Congressional Research Service dalam tulisannya berjudul *Coup in Burma: Implications for Congress* yang dipublikasikan pada tahun 2021 membahas bahwa penggunaan kekuatan mematikan oleh SAC terhadap para pengunjuk rasa anti-kudeta tersebar luas ke seluruh negeri. Menurut satu organisasi kemanusiaan, lebih dari 40 dari mereka yang tewas pada 20 April 2021 adalah anak-anak. Para perwira militer yang setia pada SAC juga diduga terlibat dalam penjarahan dan perusakan properti sipil. Pada pertengahan Maret 2021, Program Pangan Dunia (WFP) memperingatkan bahwa dampak krisis politik pasca-kudeta 2021 pada rantai pasokan makanan dan pasar mulai memengaruhi populasi termiskin Myanmar (*Congressional Research Service*, 2021).

Andrea Passeri dalam tulisannya yang berjudul *The Domestic and International Implications of Myanmar's 2021 Military Coup* yang dipublikasikan pada tahun 2021 di *IKMAS Working Paper Series* membahas bahwa krisis politik pasca-kudeta Myanmar 2021 bisa digambarkan sebagai konfrontasi multidimensi pada tiga ruang yang berbeda: jalanan di kota-kota besar dan daerah-daerah yang dihuni etnis minoritas, di mana kedua belah pihak setiap hari bentrok dengan kekerasan yang meningkat; lingkup daring di mana *netizen* kedua belah pihak bersaing dengan narasi dan operasi propaganda yang berbeda; dan lingkup internasional, dimana kedua pihak sama-sama berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan diplomatik internasional (Passeri, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu kelompok pertama yang sudah dijabarkan, tidak dijelaskan mengapa junta militer Myanmar yang baru yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Dewan Administrasi Negara (SAC), berkeras pendirian dan menolak untuk menuruti permintaan ASEAN agar memenuhi

aspirasi publik Myanmar untuk demokrasi dan kebebasan mendasar yang lebih besar. Penelitian penulis akan membahas mengenai hubungan antara Myanmar dengan ASEAN secara keseluruhan dalam kaitannya dengan krisis politik domestik yang terjadi pasca-kudeta militer Myanmar 2021.

Pada kelompok kedua tentang upaya ASEAN dalam menyelesaikan krisis politik pasca-kudeta Myanmar 2021, Rizki Roza dalam tulisannya yang berjudul *Military Coup in Myanmar: A Test for ASEAN* yang dipublikasikan pada tahun 2021 dalam Info Singkat DPR membahas bahwa masyarakat internasional harus mempertimbangkan upaya ASEAN dalam merangkul junta militer Myanmar. ASEAN menyambut bergabungnya Myanmar pada tahun 1997 sesuai dengan norma konsultasi dan konsensus, serta ide untuk memandang sesama anggota ASEAN layaknya anggota keluarga sendiri, meskipun prosesnya tidak harmonis dan menemui berbagai kendala (Roza, 2021).

Harsh Mahaseth dan Aryan Tulsyan dalam tulisannya berjudul *The Myanmar Coup and The Role of ASEAN* yang dipublikasikan pada tahun 2022 di jurnal *SSRN* membahas bahwa strategi ASEAN mengalami ketidakjelasan karena tetap lebih bersedia untuk menciptakan posisi bersatu melawan tekanan pihak eksternal daripada merumuskan kebijakan tunggal berkenaan dengan Myanmar. Akibatnya, demokrasi tidak dapat dipaksakan untuk terwujud di Myanmar (Mahaseth et al, 2022).

Charles Dunst dalam tulisannya berjudul *The Myanmar Coup as an ASEAN Inflection Point* yang dipublikasikan pada tahun 2021 di jurnal *Journal of Indo-Pacific Affairs* membahas bahwa ASEAN menolak untuk membuat pernyataan bersama dalam kaitannya dengan kudeta militer Myanmar 2021 karena beberapa negara anggotanya mengalami *democratic backsliding* dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya adalah Thailand yang mengalami kudeta militernya sendiri oleh Jenderal Prayuth Chan-

ocha pada tahun 2014 dan Kamboja di bawah Perdana Menteri Hun Sen yang memerintah dengan tangan besi selama lebih dari tiga dekade dan menjadi pemimpin non-monarki terlama di dunia (Dunst, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu kelompok kedua yang telah dijabarkan, tidak dijelaskan mengapa ASEAN tidak berhasil dalam mendorong pihak junta militer Myanmar agar lebih terbuka dan bersedia untuk melakukan perundingan dengan oposisi pro-demokrasi negara tersebut. Penelitian penulis akan membahas mengenai upaya dan kebijakan ASEAN dalam menghadapi dan melunakkan junta militer Myanmar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang tepat untuk mengkaji permasalahan ini yaitu sebagai berikut.

Mengapa ASEAN gagal dalam menyelesaikan krisis politik dan kemanusiaan Myanmar pasca-kudeta 2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menelaah peran ASEAN dalam menyelesaikan krisis politik dan kemanusiaan Myanmar pasca-kudeta 2021.
2. Memahami kegagalan ASEAN dalam menyelesaikan krisis politik dan kemanusiaan Myanmar pasca-kudeta 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai referensi untuk generasi berikutnya, peneliti, serta pengkaji ASEAN.

1.5.2 Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif bagi generasi berikutnya mengenai fenomena kudeta dan regionalisme.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam proposal ini terdiri atas tiga bab di antaranya sebagai berikut.

- **Bab I: Pendahuluan**

Di Bab I, penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- **Bab II: Konsep dan Teori Penelitian**

Di Bab II, penulis membahas tentang konsep kudeta dan teori regionalisme.

- **Bab III: Metode Penelitian**

Di Bab III, penulis membahas tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian penulis.

- **Bab IV: Pembahasan**

Di Bab IV, penulis membahas tentang dinamika kekuasaan militer di Myanmar, krisis politik dan

kemanusiaan pasca-kudeta Myanmar 2021, reaksi regional dan internasional terhadap kudeta militer Myanmar 2021, peran ASEAN dalam penyelesaian krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021, serta kegagalan ASEAN dalam penyelesaian krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021.

- **Bab V: Kesimpulan dan Saran**

Di Bab V, penulis membahas tentang kesimpulan, saran praktis, dan saran akademis untuk penelitian ini.